

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMARITIMAN INDONESIA: ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG DALAM OPTIMALISASI EKONOMI BIRU BERKELANJUTAN

Irman.S¹, Eliyanti Agus Mokodompit²

irmanmaneng83@gmail.com¹, eamokodompit66@gmail.com²

Halu Oleo

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas wilayah laut 5,9 juta km² memiliki potensi ekonomi maritim yang strategis untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan ekonomi biru dalam pengembangan sektor kemaritiman Indonesia menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut (Bakamla), akademisi maritim, dan pelaku usaha kelautan, serta studi dokumentasi kebijakan periode 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia memiliki potensi besar di sektor perikanan dengan produksi 21,83 juta ton (2020) dan nilai ekspor USD 5,72 miliar (2021), pariwisata bahari dengan destinasi unggulan dari Sabang hingga Raja Ampat, transportasi laut melalui tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) bernilai USD 1,5 juta per hari, serta industri galangan kapal dan bioteknologi kelautan. Namun, terdapat tantangan signifikan berupa eksploitasi berlebihan sumber daya ikan, pencemaran laut, perubahan iklim yang mengancam 36,18% terumbu karang berkategori jelek, keterbatasan infrastruktur, kekurangan SDM terampil, dan tumpang tindih regulasi antarinstansi. Pemerintah merespons melalui Kebijakan Kelautan Indonesia (Perpres No. 16/2017) dengan tujuh pilar: pengelolaan sumber daya kelautan dan SDM, pertahanan dan keamanan maritim, tata kelola kelembagaan, ekonomi dan infrastruktur, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Visi Indonesia 2045. Implementasi ekonomi biru yang efektif memerlukan sinergi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan koordinasi kuat antarinstansi, peningkatan investasi infrastruktur maritim, penguatan penegakan hukum laut, dan pengembangan kapasitas SDM untuk mengoptimalkan kontribusi sektor maritim dari 2,76% PDB (2021) menuju target 12,5% PDB pada 2045, mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan salah satu dari lima ekonomi terbesar global.

Kata Kunci : Kebijakan Maritim, Optimalisasi Ekonomi Biru.

PENDAHULUAN

Secara geografis Indonesia membentang dari 60 LU sampai 110 LS dan 920 sampai 1420 BT, terdiri dari pulau - pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. Tiga perempat wilayahnya adalah laut (5,9 juta km²), dengan panjang garis pantai 95.161 km, terpanjang kedua setelah Kanada. Melalui Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957, Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia (laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia) menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Dan Indonesia sebagai negara kepulauan, telah diakui dunia internasional melalui konvensi hukum laut PBB ke tiga, United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982), kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang - Undang No.17 Tahun 1985. Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia menjadi 5,9 juta km², terdiri atas 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 juta km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif, luas perairan ini belum termasuk landas kontinen. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (Arianto, 2020)

Akan tetapi, di sisi yang lain, kondisi terkini terumbu karang di Indonesia sedikit

mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari total 1067 site, terumbu kategori jelek sebanyak 386 site (36.18%), terumbu kategori cukup sebanyak 366 site (34.3%), terumbu kategori baik sebanyak 245 site (22.96%) dan kategori sangat baik sebesar 70 site (6.56%). Ekosistem terumbu karang meskipun terlihat kokoh karena fungsinya sebagai salah satu pemecah arus gelombang laut, namun nyatanya sangat rentan terhadap perubahan iklim. Akhir-akhir ini keberadaan ekosistem terumbu karang terancam sehingga berpotensi mengalami degradasi. Ancaman tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan yang ditemukan pada terumbu karang di beberapa daerah di Indonesia. Ancaman terhadap kelestarian terumbu karang salah satunya disebabkan oleh aktivitas antropogenik seperti degradasi habitat dan perubahan kimiawi laut dan juga aktifitas penangkapan dan wisata yang destruktif pada ekosistem ini. Selain itu kerusakan terumbu karang dapat disebabkan oleh proses-proses alam seperti suhu air laut yang tidak normal, tingkat sinar ultraviolet yang tinggi, dan sebagainya

Untuk menjawab tantangan tersebut, konsep ekonomi biru (blue economy) hadir sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan. Ekonomi biru menekankan pada pemanfaatan sumber daya laut secara bijaksana dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem untuk generasi mendatang, berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional yang cenderung eksploitatif. Pemerintah Indonesia telah merespons paradigma ini melalui berbagai kebijakan maritim nasional, termasuk visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, program tol laut untuk meningkatkan konektivitas, serta Rencana Aksi Nasional Ekonomi Biru yang diluncurkan untuk mengoptimalkan potensi kelautan secara berkelanjutan. Namun dalam implementasinya, berbagai kebijakan tersebut masih menghadapi kendala seperti tumpang tindih kewenangan antarinstitusi, keterbatasan anggaran, inkonsistensi regulasi, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan (Darajati, 2025)

Tinjauan Pustaka

A. Konsep Ekonomi Biru (Blue Economy)

Konsep ekonomi biru pertama kali diperkenalkan oleh profesor Gunter Pauli dalam bukunya yang berjudul *The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*. Beliau mengemukakan teori yang menerangkan terkait potensi manfaat teorinya terhadap perlindungan lingkungan hidup bagi seluruh komunitas dunia, pelestarian sumber daya alam, inisiatif pengurangan biaya industri dengan pengalihan pada konsumsi energi hijau, bersih, daur ulang ataupun terbarukan. Sedangkan menurut Jusuf (2012), ekonomi biru merupakan tindakan yang berakar pada pengembangan ekonomi masyarakat secara komprehensif yang memiliki tujuan akhir untuk pencapaian pembangunan nasional secara menyeluruh. Pendekatan pembangunan yang berlandaskan ekonomi biru akan bersinergi dengan pelaksanaan triple track strategy, yaitu program pro-growth (pertumbuhan), pro-poor (pengentasan kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja) dan pro-environment (melestarikan lingkungan). Ketika sumber daya alam dan daya tampung lingkungan sudah tidak seimbang dan tidak mampu lagi dalam memfasilitasi kegiatan penduduk baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun mobilitas penduduk. Maka kehidupan umat manusia saat ini dan kehidupan generasi manusia mendatang akan terancam karena kesalahan fatal akibat kerusakan lingkungan (Khoiriyah, 2024).

B. Kebijakan Maritim Indonesia

Kebijakan Maritim Indonesia memiliki beberapa peran penting dalam menjaga

keamanan transportasi laut. Penyediaan Infrastruktur Investasi dalam infrastruktur pelabuhan dan fasilitas maritim adalah bagian integral dari kebijakan ini. Pelabuhan modern dan fasilitas yang memadai membantu memastikan kelancaran operasi transportasi laut. Pengawasan dan Patroli Keberadaan Angkatan Laut dan Kepolisian Laut Indonesia memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap perairan Indonesia. Patroli rutin dan pengawasan meningkatkan deteksi terhadap potensi ancaman keamanan. Kerja Sama Regional: Kebijakan Maritim Indonesia mendukung kerja sama regional dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional seperti IMO (International Maritime Organization). (Muammar & Mosyofa, 2024).

C. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Model klasik seperti top-down (Pressman & Wildavsky, 1973) menekankan hierarki dan kepatuhan atas kebijakan dari pusat ke daerah, sementara bottom-up (Lipsky, 1980) menyoroti peran aktor lokal seperti birokrat jalanan dalam menyesuaikan kebijakan dengan konteks lapangan. Dalam konteks Indonesia terkini, model Van Meter dan Van Horn (1975) sering digunakan untuk menganalisis faktor seperti standar kebijakan, sumber daya, dan komunikasi antarorganisasi, sebagaimana dibahas dalam tinjauan sistematis yang menunjukkan evolusi implementasi kebijakan di tengah reformasi administrasi.

Model collaborative governance (Ansell & Gash, 2008) dan new public management (Hood, 1991) juga tetap relevan, dengan penelitian menyoroti tantangan seperti inersia birokrasi dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, teori Edward III (1980) tentang komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi diterapkan dalam kasus program pendidikan nasional, menegaskan perlunya harmonisasi untuk keberhasilan implementasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji implementasi kebijakan kemaritiman dan ekonomi biru di Indonesia secara mendalam dan sistematis. Pendekatan deskriptif-analitis dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara faktual sekaligus menganalisis hubungan kausal antara berbagai variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan (Sugiyono, 2019; Creswell & Creswell, 2018). Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci meliputi pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut (Bakamla), akademisi bidang maritim, dan pelaku usaha sektor kelautan, serta data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan tahunan, statistik kelautan dan perikanan, serta jurnal ilmiah yang dipublikasikan dalam rentang 2020-2025 yang diakses melalui Google Scholar dan ScienceDirect.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Ekonomi Maritim Indonesia

Laut sebagai perairan berperan penting terhadap kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya di bumi. Wilayah Indonesia yang 70%-nya merupakan lautan menyediakan cukup sumber makanan, bahan pertambangan, obatobatan, hingga sumber mata pencaharian. Apalagi terdapat keberadaan plankton dan terumbu karang yang berperan penting bagi kehidupan manusia sebagai penyedia oksigen sekaligus menyerap karbon dioksida di atmosfer bumi.

Indonesia dapat pula menyediakan potensi untuk kemanfaatan pada bidang lain, seperti pariwisata pantai, wisata budaya, turisme pesiar, pelancongan olahraga, safari

alam, dan wisata bisnis. Terdapat juga prospek industri galangan kapal yang dapat mendukung menggerakkan ekonomi. Misalnya bisnis perkapalan, industri jangkar, industri peralatan navigasi, industri plat baja, industri perpipaan, industri instalasi listrik, industri mesin kapal, industri baling-baling kapal, industri penangkapan ikan, pelabuhan, transportasi, industri lepas pantai, dan industri pertahanan. Berbagai realitas di atas menunjukkan bahwa perairan laut Indonesia menjadi wilayah penting karena berkontribusi terhadap iklim global; memiliki banyak kekayaan alam; dan dilintasi oleh banyak kapal penumpang, dagang, maupun perang dari berbagai belahan dunia. Hal-hal tersebut dapat menunjukkan Indonesia sebagai negara maritim (Sumarno, 2012).

Tabel. Potensi Keekonomian Laut Indonesia

MACAM POTENSI	JUMLAH
BUDI DAYA IKAN	Kakap, gobia, dan kerapu dengan potensi kelautan sebesar 9,3 juta ton setiap tahunnya (KKP, 2019)
BUDI DAYA IKAN HIAS	Sebanyak 236 jenis ikan hias terbaik di dunia
BUDI DAYA RUMPUT LAUT DAN TERUMBU KARANG	Seluas 85.707 km ² dengan 6 dari 10 wilayah ekosistem terumbu karang terbaik di dunia (KKP, 2018)
BUDI DAYA MOLUSKA	Mutiara, teripang, dan kerang-kerangan (KKP, 2020)
BUDI DAYA INDUSTRI BIOTEKNOLOGI KELAUTAN	Benih ikan, udang, bahan pangan, dan pakan alami (Yuniar, 2012)
BUDI DAYA HUTAN MANGROVE	Seluas 4,25 juta hektar (KKP, 2016)
SUMBER DAYA MINERAL	Minyak dan gas bumi, gas biogenik kelautan, pasir kuarsa, kromit, posporit, monazite dan zirkon, emas dan perak, pasir besi, timah, agregat bahan konstruksi, nodul dan kerak mangan, dan mineral hidrotermal.
ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI)	Memiliki tiga (3) ALKI dengan potensi sebesar USD 1,5 Juta atau Rp 23,3 Miliar setiap harinya (Yashuananda et al, 2018)

Sumber: (Iswardhana, 2023)

B. Implementasi Kebijakan Kemaritiman

Kebijakan kelautan Indonesia merupakan serangkaian kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan negara serta mendorong pembangunan ekonomi maritim yang berkelanjutan. Kebijakan kelautan Indonesia (KKI) sebagai rencana aksi untuk mewujudkan program-program dibidang kelautan dan kemaritiman, yang termuat dalam peraturan Presiden no. 16 tahun 2017 tentang kebijakan kelautan indonesia. Adapaun Kebijakan Kelautan Indonesia terdiri atas tujuh pilar sebagai berikut (Zulkifli et al., 2023):

1. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut
3. Tata Kelola dan Kelembagaan Laut
4. Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan
5. Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut

C. Analisis Tantangan

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan ekonomi maritim Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi secara komprehensif dan terkoordinasi agar potensi ekonomi maritim dapat dimanfaatkan secara optimal.

1. Eksploitasi Berlebihan

Penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing) dan praktik penangkapan ikan

ilegal (illegal fishing) mengancam keberlanjutan sumber daya ikan di laut. Penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, seperti bom ikan dan pukat harimau, juga menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik ilegal ini, serta mendorong penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.

2. Pencemaran Laut

Pencemaran laut merupakan masalah serius yang mengancam kesehatan ekosistem laut dan kualitas sumber daya perikanan. Sumber-sumber pencemaran laut meliputi limbah industri, limbah domestik, tumpahan minyak, dan sampah plastik. Pemerintah perlu meningkatkan pengelolaan limbah, menerapkan standar lingkungan yang ketat, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan laut.

3. Perubahan Iklim

Perubahan iklim menyebabkan kenaikan permukaan air laut, peningkatan suhu air laut, dan perubahan pola cuaca. Dampak perubahan iklim ini dapat mengancam keberadaan pulau-pulau kecil, merusak ekosistem terumbu karang, dan mengurangi produktivitas perikanan. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah adaptasi dan mitigasi untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap sektor maritim.

4. Kurangnya Infrastruktur

Keterbatasan infrastruktur, seperti pelabuhan, jalan, dan jaringan listrik, menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi maritim. Pembangunan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung kegiatan perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, dan industri lainnya. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur maritim dan mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur (Dhaniswari & Rakhmagina, 2022)

5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kurangnya tenaga kerja yang terampil dan kompeten menjadi kendala dalam pengembangan sektor maritim. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di bidang maritim, serta mendorong kerjasama antara lembaga pendidikan dan industri maritim (Dhaniswari & Rakhmagina, 2022)

6. Tumpang Tindih Regulasi

Tumpang tindih regulasi dan birokrasi yang rumit dapat menghambat investasi dan pengembangan usaha di sektor maritim. Pemerintah perlu menyederhanakan regulasi dan meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

D. Analisis Peluang

Ekonomi maritim mencakup berbagai sektor yang terkait dengan laut, mulai dari perikanan, pariwisata bahari, energi kelautan, hingga transportasi laut dan industri galangan kapal. Masing-masing sektor ini memiliki potensi yang signifikan untuk dikembangkan.

1. Perikanan dan Kelautan

Potensi kelautan dan perikanan terdiri dari sembilan kelompok SDI, yaitu ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan demersal, ikan karang, udang penaeid, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi. Berdasarkan aturan tersebut, potensi SDI mencapai 12,01 juta ton per tahun yang berada di 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Dari total potensi tersebut, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan 5 sebanyak 8,64 juta ton per tahun. Potensi ikan terbanyak berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 dengan estimasi potensi sebesar 2,64 juta ton per tahun. Jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan di wilayah ini sebanyak 2,11

juta ton per tahun. Selanjutnya, potensi ikan di WPPNRI 573 mencapai 1,34 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan sebanyak 985.645 ton per tahun. Potensi SDI sebanyak 1,31 juta ton per tahun berada di WPPNRI 711 dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 911.534 ton per tahun. (Sumber: KKP 2022) dalam (Sabir & Mokodompit, 2023).

2. Pariwisata Bahari

Indonesia pastinya memiliki beberapa tempat yang dijadikan prioritas ekowisata bahari dari sabang sampai dengan merauke. Dimulai dari Pulau Nias yang merupakan sebuah pulau kecil di Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan wisata bahari seperti Pantai Sorake, Pantai Fofola, Pantai Hoya, Pantai Onolimbu, dan lainnya. Kemudian bergeser ke pulau Sabang, dengan objek wisata bahari seperti Pulau Weh, Pantai Gapang, Pantai Iboih, Pantai Rubiah, Pantai Paradiso, Danau Aneuk Laot. Setelah itu melihat daerah Raja Ampat dan sekitarnya dengan objek wisata bahari seperti Pulau Kofiau, Misool, Waigeo Selatan dan Barat, Kepulauan Ayau. Kemudian ada Anambas, dengan objek wisata pulau, diikuti oleh Wakatobi dengan objek TN Wakatobi (Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomea, Pulau Binongko). Masih di Pulau Sulawesi yaitu di Bunaken juga terdapat TN Bunaken (Pulau Bunaken, Pulau Siladen, Pulau Montehage, Pulau Nain). Kemudian ada juga Pulau yang tidak kalah dengan Pulau Bali yaitu Pulau Lombok, dengan tujuan wisata TN Gunung Rinjani, Segenter, Desa Bayan, Senaru, Air Terjun Sendang Gile, Gunung Rinjani, Tebebatu, Air Terjun Jukut, dan yang terakhir Pulau Flaures yang tidak kalah indah dengan objek wisata Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Sabolo Besar, dan Danau Kelimutu (Kaltim, 2015) dalam (Sabir & Mokodompit, 2023).

3. Transportasi Laut:

Posisi strategis Indonesia sebagai jalur lintas laut internasional tidak bisa disangkal lagi. Dalam hal ini, laut dapat dianggap sebagai alat politik internasionalnya. Dengan kata lain, laut dapat digunakan sebagai alat pemersatu bangsa dalam hal kedaulatan, alat transportasi laut atau jalur perdagangan, alat pengendalian sumber daya, media pertahanan dan keamanan, serta alat untuk mempengaruhi kebijakan tetangga atau kebijakan internasional. Dengan dukungan sebagai negara dengan wilayah kepulauan terbesar, diikuti dengan sumber daya yang melimpah, serta posisi yang strategis dan keberadaan lingkungan pariwisata yang berpotensi, dapat menjadi kekuatan bagi Indonesia untuk berhasil di lautnya sendiri. Selain itu, dukungan dari jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang dapat digunakan sebagai jalur pelayaran internasional (Sabir & Mokodompit, 2023)

4. Industri Galangan Kapal:

Industri galangan kapal memiliki peran strategis dalam mendukung sektor transportasi laut dan pertahanan negara. Pengembangan industri galangan kapal dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor kapal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kemampuan teknologi nasional. Pemerintah memberikan dukungan terhadap pengembangan industri galangan kapal melalui berbagai kebijakan, seperti insentif fiskal, pelatihan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas produk.

E. Model Optimalisasi Ekonomi Biru Indonesia

Ekonomi biru di Indonesia telah menjadi bagian dari kebijakan dan rencana nasional, dengan beberapa agenda kegiatan yang telah disusun di dalamnya (Alifa & Zahidi, 2024):

1. Rencana Pembangunan Nasional Indonesia

Rencana jangka panjang, menengah, serta tahunan merupakan bagian dari rencana pembangunan nasional Indonesia. Ekonomi biru juga masuk ke dalam rencana

pembangunan nasional tersebut. Hal tersebut telah dicetuskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Rencana tersebut dirancang untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berdasarkan kepentingan nasional melalui strategi yang mencakup pengembangan wawasan dan pembentukan budaya maritim, penguatan peran sumber daya manusia maritim, penataan wilayah dan aset Republik Indonesia, menjaga kedaulatan yurisdiksi dan aset, mengembangkan industri maritim secara sinergis, mengurangi bencana pesisir dan polusi laut, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di daerah pesisir.

2. Kebijakan Kelautan Indonesia dan Rencana

Aksi Kebijakan Kelautan 2021-2025 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017, disebutkan bahwa pentingnya nilai-nilai laut dan arah pengembangan melalui ekonomi biru sebagai upaya mencapai ekonomi biru yang berkelanjutan dan sukses. Kebijakan kelautan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri maritim yang kompetitif, serta melindungi lingkungan laut. Kebijakan ini juga menetapkan tujuan-tujuan kunci bagi lingkungan laut Indonesia, termasuk pengelolaan optimal dan berkelanjutan sumber daya laut, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi maritim, pertahanan dan keamanan maritim yang kuat, serta implementasi tata kelola laut yang baik. Meskipun ekonomi biru Indonesia diungkapkan sebagai salah satu dari enam prinsip dasar, namun ekonomi biru yang benar-benar berkelanjutan dan berhasil seharusnya mencakup semua prinsip dari kebijakan kelautan tersebut.

3. Rencana Aksi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Indonesia Rencana aksi pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk Indonesia telah diundangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, dan diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022. Dokumen ini memberikan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sebagian besar SDGs. Fungsinya melibatkan memberikan panduan kepada lembaga-lembaga dan pemangku kepentingan nasional dan lokal dalam pengembangan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi rencana aksi nasional dan subnasional. Peraturan Presiden juga menetapkan wewenang dan tanggung jawab Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait implementasi rencana Aksi SDGs, termasuk penunjukan tim koordinasi dan panel ahli. Peran Bappenas dalam koordinasi perencanaan di Indonesia terkait SDGs dan ekonomi biru memberikan peluang kunci untuk memaksimalkan keselarasan dan sinergi antara kegiatan-kegiatan tersebut.

4. Visi 2045

Indonesia Visi Indonesia 2045 menetapkan tujuan negara untuk menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045. Visi ini didasarkan pada empat pilar utama, yaitu (1) pengembangan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) pembangunan ekonomi berkelanjutan; (3) pembangunan yang adil; dan (4) tata pemerintahan yang baik. Pilar kedua, yang berfokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, mengakui pentingnya ekonomi maritim Indonesia. Visi ini menetapkan target untuk meningkatkan kontribusi ekonomi maritim dari enam koma empat persen (6,4%) PDB pada tahun 2015 menjadi dua belas koma lima persen (12,5%) pada tahun 2045 melalui tiga strategi: (a) memperkuat peran dengan fokus pada konektivitas laut yang efektif dan efisien, industri perikanan yang berkelanjutan dan kompetitif, serta pariwisata laut yang inklusif; (b) menciptakan sumber daya manusia maritim berkualitas yang kompetitif,

inovasi teknologi maritim, dan budaya maritim yang kuat sebagai dasar peradaban maritim; dan (c) membangun kemampuan pertahanan dan keamanan maritim yang kuat dan dapat diandalkan untuk menghadapi tantangan regional dan global.

KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas laut mencapai 5,9 juta km² memiliki potensi ekonomi maritim yang sangat besar, mulai dari perikanan, pariwisata bahari, energi kelautan, hingga transportasi laut dan industri galangan kapal. Namun, potensi tersebut menghadapi berbagai tantangan serius seperti eksploitasi berlebihan, pencemaran laut, perubahan iklim, keterbatasan infrastruktur, kurangnya SDM terampil, dan tumpang tindih regulasi yang menghambat optimalisasi sektor maritim. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menerapkan konsep ekonomi biru melalui berbagai kebijakan seperti Kebijakan Kelautan Indonesia yang terdiri dari tujuh pilar utama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Rencana Aksi SDGs, dan Visi Indonesia 2045 yang menargetkan kontribusi ekonomi maritim mencapai 12,5% dari PDB pada tahun 2045. Keberhasilan implementasi ekonomi biru memerlukan pendekatan sistemik dan terintegrasi yang menggabungkan pengelolaan sumber daya berkelanjutan, penguatan pertahanan dan keamanan maritim, tata kelola yang baik, pembangunan infrastruktur memadai, perlindungan lingkungan laut, serta pengembangan SDM berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifa, N. N., & Zahidi, M. S. (2024). Pengembangan Ekonomi Biru Sebagai Strategi Indonesia Menuju Ekonomi Maju. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 38(1), 48–65. <https://doi.org/10.52318/jisip.2023.v38.1.4>
- Arianto, M. F. (2020). Potensi Wilayah Pesisir di Negara Indonesia. *Jurnal Geografi*, 20(20), 1–7.
- Darajati, M. R. (2023). Ekonomi Biru: Peluang Implementasi Regulasi Di Indonesia. *TheJournalish: Social and Government*, 4(5), 41–53. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/599>
- Darajati, M. R. (2025). Urgensi Implementasi Konsep Ekonomi Biru dalam Tata Kelola Sektor Kelautan Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 14(1), 15. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v14i1.12972>
- Dhaniswari, A. M., & Rakhmagina, N. (2022). Tantangan Dari Visi “Poros Maritim Dunia” Dalam Rangka Meningkatkan Laju Ekonomi Maritim Di Indonesia. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 33–42.
- Hastuti, H., Muhidu, A., Rastin, R., & Agus Mokodompit, E. (2023). Indonesia’s Marine Economic Potential As A Maritime Country. *International Journal of Science, Technology & Management*, 4(4), 813–825. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v4i4.897>
- Iswardhana, M. R. (2023). Analisis Tata Kelola Maritim Indonesia: Implementasi Visi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 13(2), 125. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v13i2.12542>
- Khoiriyah, A. Z. (2024). IMPLEMENTASI EKONOMI BIRU DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(2), 38–51. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/4102>
- Muammar, N., & Mosyofa, A. (2024). Kebijakan Maritim Indonesia Dalam Menunjang Sistem Keamanan Transportasi Laut. *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, 7(1), 46–50. <https://doi.org/10.62012/sensistek.v7i1.31639>
- Sabir, M. R. P., & Mokodompit, E. A. (2023). Analisis potensi maritim indonesia. [1] Sabir MRP, Mokodompit EA. ANALISIS POTENSI MARITIM INDONESIA. Epub Ahead of Print 15 July 2023. DOI: 10.31219/Osf.Io/Dnrt3, 1–9.

Zulkifli, Nurjannah, I., Usman, & Mokodompit, E. A. (2023). Implikasi Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Pengembangan Ekonomi Maritim. OSF Preprints, 1–15. <https://osf.io/nps2v>.